

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengangguran

1. Pengertian Pengangguran

Pengangguran memiliki arti keadaan ketika seseorang sudah termasuk golongan angkatan kerja dan tengah gencar mencari pekerjaan namun belum juga menemukan pekerjaan. Orang yang sedang tidak bekerja namun ia juga tidak sedang mencari pekerjaan bukan termasuk kategori pengangguran.¹⁹ Dari keseluruhan jumlah penduduk yang termasuk pada usia kerja tidak semuanya mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, jadi mereka yang tengah tidak bekerja dan tidak gencar mencari pekerjaan dengan alasan apapun inilah yang dimaksud dengan pengangguran.²⁰

2. Faktor Penyebab Pengangguran

Menurut teori pengangguran oleh Keynes, pengangguran dapat terjadi diakibatkan oleh tingkat aktivitas perekonomian yang dapat dicapai selalu lebih rendah dari tingkat aktivitas perekonomian pada saat full employment. Presentase angkatan kerja yang belum dan tidak bekerja disebut dengan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran inilah yang harus menjadi fokus perhatian dalam penanganan permasalahan. Selain itu apabila membandingkan tingkat pengangguran pada suatu negara dengan

¹⁹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 472

²⁰ Prathama Raharja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Indonesia, 2008) hal. 379

negara lainnya maka itu tidak akan ada manfaatnya sebab gambaran permasalahan yang berlaku pada tiap negara tidak akan sama.²¹

Orang yang termasuk kategori pengangguran adalah yang berada pada usia kerja dan sudah masanya untuk bekerja namun belum memperoleh pekerjaan. Usia yang dimaksud dalam hal ini merupakan usia kerja dengan range relatif di atas 6 sampai 18 tahun, yang umumnya pada usia tersebut masih tergolong usia anak-anak dan sedang berada pada masa sekolah.²² Orang yang berada pada usia tidak produktif baik itu anak-anak maupun lansia, hidupnya tergantung pada mereka yang sedang dalam masa produktif. Sebab itulah sebisa mungkin pemerintah dan masyarakat secara bersama untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat diisi oleh orang-orang pada usia produktif, sehingga beban yang ditanggung dapat diminimalisir.

Selain itu terdapat empat faktor yang dapat menyebabkan timbulnya masalah pengangguran di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Orientasi kebijakan pembangunan ekonomi
- b. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia
- c. Daya saing industri
- d. Globalisasi²³

²¹ *Ibid.*, hal. 473

²² Iskandar Putong, *Ekonomi Makro: Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Volume 1 Dari Ekonomi Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2003) hal.169.

²³ Sutyastie Soemitro Remi, *Mobilitas Penduduk dan Bonus Demografi*, (Bandung: Unpad Press, 2015), hal. 54-55

3. Macam-Macam Pengangguran

Pengangguran dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis sebagai berikut²⁴:

a. Pengangguran Friksional

Pengangguran tipe ini merupakan seseorang yang menganggur disebabkan karena ia adalah tenaga kerja yang baru mencari pekerjaan pertamanya dan tenaga kerja yang sifatnya hanya sementara. Hal itu dapat terjadi karena tenaga kerja masih belum menetap dan mudah untuk mencari atau berpindah pekerjaan sesuai dengan keinginan mereka.

b. Pengangguran Struktural

Pengangguran tipe struktural merupakan tenaga kerja yang menganggur disebabkan oleh kemampuan atau keterampilan kerja yang tidak cocok dan masih belum memenuhi target dari perusahaan tempat pekerja tersebut melamar.

c. Pengangguran Siklus

Pengangguran yang digolongkan ke dalam tipe siklus merupakan tenaga kerja yang menganggur disebabkan karena runtuhnya siklus bisnis. Pada saat perekonomian sedang berada pada kondisi resesi atau depresi, keadaan tersebut dapat memicu suatu perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja bagi beberapa karyawannya demi menstabilkan kembali kondisi keuangan perusahaan.

²⁴ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 328

d. Pengangguran Musiman

Pengangguran yang digolongkan ke dalam tipe musiman merupakan tenaga kerja yang menganggur karena adanya perubahan pola waktu perekrutan tenaga kerja.

Menurut teori Edgar O. Edwards terdapat lima bentuk pengangguran²⁵:

a. Pengangguran Terbuka

Seseorang termasuk ke dalam golongan pengangguran terbuka ketika ia secara sukarela enggan bekerja demi mengharapkan pekerjaan yang lebih baik, maupun seseorang yang terpaksa tidak bekerja karena tidak mendapatkan pekerjaan.

b. Setengah Menganggur

Seseorang yang bekerja dalam waktu yang kurang dari jam kerja mereka biasanya.

c. Tampaknya Bekerja Tetapi Tidak Bekerja Secara Penuh

1) Pengangguran tidak kentara, seperti seorang petani yang bekerja di sawah selama sehari penuh padahal pekerjaan tersebut mestinya dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat.

2) Pengangguran tersembunyi, yakni seseorang yang bekerja dengan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidangnya atau tingkat pendidikannya.

²⁵ Achmad Daengs, *Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Berbasis Investasi*. (Surabaya: Unitomo Press, 2020), hal 132

3) Pensiun dini, yakni berhenti bekerja lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan.

d. Tenaga Kerja yang Lemah

Tenaga kerja yang lemah diartikan sebagai seseorang yang bekerja *full time*, namun tidak dapat bekerja dengan optimal karena menderita suatu penyakit atau kekurangan gizi.

e. Tenaga Kerja yang Tidak Produktif

Tenaga kerja yang tidak produktif merupakan seseorang yang sanggup untuk bekerja secara produktif, namun terkendala oleh sumber daya yang tidak memadai.

4. Indikator Pengangguran

Terdapat beberapa indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran, diantaranya:

a. Pertumbuhan Ekonomi Negara

Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, maka pengaruhnya jumlah pengangguran akan semakin menurun.

b. Tingkat Inflasi

Menurut A.W. Philips pengangguran dan inflasi memiliki hubungan yang terbalik (*tradeoff*). Semakin tinggi tingkat inflasi pada suatu negara, maka semakin rendah tingkat penganggurannya. Hal tersebut dikarenakan pada saat inflasi tinggi, Philips menganggap bahwa permintaan agregat mengalami kenaikan

sehingga akan lebih banyak tenaga kerja terserap untuk kegiatan produksi.²⁶

c. Besaran Upah yang Berlaku

Besaran upah dan jumlah pengangguran memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Semakin tinggi tingkat upah maka tingkat pengangguran semakin rendah.

Di samping itu, tingkat pengangguran dapat diketahui melalui dua pendekatan:

a. Pendekatan Angkatan Kerja (*Labor Force Approach*)

Tingkat pengangguran diperoleh dari persentase perbandingan jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja.

b. Pendekatan Pemanfaatan Tenaga Kerja (*Labor Utilization Approach*)

Ditentukan melalui pemanfaatan tenaga kerja, yaitu apakah termasuk ke dalam bekerja penuh atau setengah menganggur. Bekerja penuh (*employed*) dalam artian orang-orang yang bekerja secara full atau minimal jam kerjanya 35 jam per minggu. Sedangkan setengah menganggur (*underemployed*) merupakan orang-orang yang jam kerjanya kurang dari 35 jam dalam seminggu, atau mereka bekerja tetapi belum secara penuh.²⁷

Dampak negatif dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kesejahteraan. Ketika

²⁶ Biro Analisis Anggaran dan Pelaksanaan APBN, *Analisis Keberadaan Trade Off Inflasi dan Pengangguran (Kurva Philips) di Indonesia*, (Jakarta: DPR, 2014), hal. 25

²⁷ Murni Asfia, *Ekonomi Makro*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 198

kesejahteraan masyarakat menurun maka kemungkinan mereka terjerumus dalam kemiskinan semakin nyata.²⁸Selain itu, Lincoln Arsyad memaparkan bahwa ada hubungan erat antara tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu dianggap berada di golongan penduduk miskin. Di sisi lain orang yang bekerja pada sektor pemerintah dan swasta dianggap termasuk pada kelas menengah ke atas. Intinya, setiap orang yang tidak bekerja dianggap miskin, dan orang yang bekerja tetap dan secara penuh dianggap kaya. Pada kenyataannya terkadang ada pekerja yang mencari pekerjaan yang lebih baik dan sesuai dengan pendidikannya dan menolak pekerjaan yang dirasa lebih rendah karena mereka mempunyai sumber lain dalam keuangannya. Orang semacam ini dapat dikatakan menganggur, namun belum tentu miskin. Demikian pula sebaliknya, ketika seseorang yang bekerja tetap dan secara penuh setiap hari namun pendapatannya tidak mencukupi sehingga mereka seringkali tetap miskin.²⁹

5. Pengangguran Menurut Perspektif Islam

Dalam perspektif agama Islam, tentu terdapat beberapa penjelasan mengenai pengangguran yang pada umumnya disebut dengan *faragh*. Pengangguran merupakan keadaan ketika seseorang sama sekali tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari.

²⁸ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makroekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2004), hal. 330

²⁹ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 3*, (Yogyakarta: Penerbit STIE YKPN, 1997), hal. 359

Sehingga pada kondisi yang serba berkekurangan tersebut, menurut Islam dapat menjadikan pengangguran termasuk ke dalam golongan fakir atau miskin dan berhak memperoleh bantuan berupa sedekah atau pun zakat.³⁰

Menurut paparan Yusuf al-Qardawi yang dikutip oleh Subhan³¹, terdapat dua kelompok pengangguran:

a. Pengangguran *Jabariyah*

Kondisi pengangguran yang tidak dapat dihindari oleh seseorang, dalam artian orang tersebut sudah berusaha untuk mendapat pekerjaan namun tetap belum mendapatkan hasil dan dengan mau tidak mau harus menerima kondisi tersebut. Situasi tersebut umumnya timbul karena tidak adanya kemampuan maupun ketidakcocokan kemampuan yang dimiliki seiring dengan perkembangan jaman.

b. Pengangguran *Khiyariyah*

Kondisi pengangguran *khiyariyah* tentu berbeda dengan pengangguran *jabariyah*, golongan pengangguran ini menganggur akibat keputusannya sendiri. Pada kondisi ini mereka hanya ingin bermalas-malasan dan berpangku tangan saja, padahal kesempatan dan kemampuan untuk bekerja sudah tersedia. Tidak ada usaha sama sekali yang dilakukan oleh penganggur tersebut agar lebih produktif, walaupun sebenarnya mereka telah mempunyai potensi yang cukup pada diri mereka.

³⁰ Moh. Subhan, "Pengangguran dan Tawaran Solutif dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2, 2018, hal. 155, <http://dx.doi.org/10.30736/jesa.v3i2.44>

³¹ *Ibid.*, hal. 159

Ketika seseorang berada dalam kondisi pengangguran di waktu yang cukup lama, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi tersebut akan memberikan pengaruh terhadap sisi keagamaannya. Ada berbagai dampak agama yang mungkin dapat terjadi akibat adanya kondisi pengangguran, yakni sebagai berikut:

a. Membahayakan Akidah

Keadaan serba berkekurangan yang dialami ketika seseorang menganggur dapat menggoda siapapun yang menghadapinya untuk melakukan hal maksiat demi memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya.

b. Membahayakan Akhlak

Jika terdapat seorang pengangguran miskin yang hidup di lingkungan orang berkecukupan, dikhawatirkan dapat memicu tekanan batin bagi orang miskin tersebut, sehingga besar kemungkinan dapat dengan mudah melupakan hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh *syara'* atau hukum agama.

c. Membahayakan Kelangsungan Rumah Tangga

Ada berbagai faktor yang akan berpengaruh untuk pengangguran yang sudah berkeluarga. Dalam segi pembinaan, kepala keluarga yang merupakan pengangguran tentunya akan tetap terikat dengan kewajiban untuk memberi nafkah bagi seluruh anggota keluarga yang berada dalam tanggungannya. Sedangkan dalam segi pemeliharaan, adanya pengangguran dalam sebuah

keluarga dapat menimbulkan terjadinya hal-hal yang tidak baik, sehingga keluarga yang seharusnya dapat terpelihara justru terabaikan karena kondisi tersebut. Apabila situasi memburuk, maka dapat memicu terjadinya perceraian dan mengakhiri kelangsungan rumah tangga yang seharusnya dibina dengan baik.³²

B. Penduduk

1. Pengertian Penduduk

Penduduk merupakan setiap orang yang tinggal pada suatu wilayah dengan jangka waktu selama 6 bulan atau lebih, termasuk mereka yang tinggal kurang dari 6 bulan namun memiliki tujuan untuk menetap di wilayah tersebut. Laju pertumbuhan penduduk merupakan persentase yang menunjukkan kenaikan jumlah penduduk pada jangka waktu tertentu. Kepadatan penduduk merupakan ukuran perbandingan banyaknya jumlah penduduk pada tiap kilometer persegi. Distribusi penduduk merupakan pola persebaran penduduk pada suatu wilayah berdasarkan batas geografis maupun batas wilayah administrasi pemerintahan. Komposisi penduduk diartikan sebagai pengelompokan persebaran penduduk berdasarkan karakteristik tertentu. Umumnya dalam penentuan komposisi penduduk kriteria yang menjadi patokan

³² *Ibid.*, hal. 160-161

ialah berdasarkan usia, jenis kelamin, tempat tinggal serta jenis mata pencaharian mereka.³³

2. Pengendalian Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan salah satu poin penting pada pembangunan ekonomi di suatu negara, sebab jumlah penduduk selalu berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri.³⁴ Para ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk adalah input potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi pada suatu perusahaan. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, Robert Malthus menganggap bahwa pada kondisi awal jumlah penduduk memang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada suatu keadaan optimum pertambahan penduduk tidak akan menaikkan pertumbuhan ekonomi dan malah akan dapat menurunkannya.

Menurut teori Harrod-Domar, modal insani atau manusia merupakan faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi dari dalam dan bersifat endogen. Ia juga memaparkan bahwa pertambahan modal dan tenaga kerja secara bersama-sama akan menghasilkan produksi dan pendapatan nasional. Kenaikan kapasitas produksi dan pendapatan nasional ditentukan oleh kenaikan pengeluaran masyarakat.

³³ BPS Kabupaten Tulungagung, *Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2021/Tulungagung Regency in figures 2021*, (Tulungagung: CV Azka Putra Pratama, 2021), hal. 84-85

³⁴ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia...*, hal. 97

Pada tahapan selanjutnya apabila distribusi pendapatannya baik maka pendapatan per kapita masyarakat meningkat sehingga kemiskinan dapat berkurang.³⁵

Mudrajad Kuncoro juga memaparkan pendapat yang serupa dengan pernyataan tersebut, menurutnya jumlah penduduk dalam hal pembangunan ekonomi suatu daerah termasuk ke dalam permasalahan yang mendasar. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan rakyat serta upaya pengurangan angka kemiskinan. Penduduk yang berkembang terlalu pesat diyakini dapat menghantarkan dan mendorong pengurasan sumber daya, kekurangan tabungan, kerusakan lingkungan, kehancuran ekologis, yang kemudian dapat memunculkan masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kelaparan.

Oleh karena itu, diperlukan perencanaan solutif untuk menjaga agar jumlah penduduk tetap terkendali. Pengendalian jumlah penduduk merupakan suatu rancangan kegiatan yang ditujukan untuk membatasi laju pertumbuhan penduduk. Kebanyakan dari teknik pengendalian jumlah penduduk yang umum di masyarakat adalah dengan cara mengurangi angka kelahiran. Upaya pengendalian jumlah penduduk yang diterapkan oleh Indonesia salah satunya adalah melalui program Keluarga Berencana (KB) yang dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan

³⁵ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2010), hal. 292

menekan angka kelahiran baru. Secara umum, terdapat dua cara yang biasa digunakan oleh pemerintah dalam menerapkan pengendalian jumlah penduduk. Pertama adalah *positive check*, yaitu suatu teknik pengendalian yang tidak moralis dan tidak dapat dikontrol, contohnya seperti adanya wabah dan terjadinya peperangan. Kedua adalah *preventive check*, yaitu teknik pengendalian jumlah penduduk dengan melakukan pengekangan moral untuk membatasi kelahiran dengan menunda pernikahan atau pembatasan jumlah anggota keluarga.³⁶

3. Teori Kependudukan

a. Teori Malthus

Pada kondisi awal jumlah penduduk memang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada suatu keadaan optimum penambahan penduduk tidak akan menaikkan pertumbuhan ekonomi dan malah akan dapat menurunkannya. Dalam buku yang ia tulis dengan judul *Principles of Population*, Malthus berpendapat bahwa perkembangan manusia lebih cepat dibanding dengan hasil produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Akibat adanya tekanan jumlah penduduk tersebut, Malthus menyimpulkan bahwa besar kemungkinan terjadi kekurangan bahan makanan untuk masing-masing penduduk. Oleh karena itu, diperlukan kontrol dan pengawasan terhadap pertumbuhan penduduk.³⁷

³⁶ Syarifuddin dan Rahmayandi Mulda, "Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Kelurahan Galang Baru Kota Batam", dalam *Jurnal Trias Politika*, Vol. 4, No. 1, 2020, hal. 29, <https://doi.org/10.33373/jtp.v4i1.2517>

³⁷ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia...*, hal. 99

b. Teori Neo-Malthusian

Asumsi dari teori ini adalah bahwa populasi manusia di bumi telah terlampaui banyak, sehingga lingkungan menjadi rusak karena adanya lonjakan populasi dan persediaan bahan makanan menjadi sangat terbatas. Penganut teori ini menganjurkan untuk diterapkannya *Preventif Check* sebagai langkah pengendalian pertumbuhan penduduk dengan menggunakan alat kontrasepsi.³⁸

c. Emile Durkheim

Teori Durkheim menjelaskan bahwa apabila pada suatu daerah angka kepadatan penduduknya tinggi maka akan muncul persaingan antar penduduk untuk dapat mempertahankan hidup.

Dari semua teori yang dipaparkan oleh para ahli ekonomi tersebut, dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang terlalu cepat justru akan menjadi hambatan. Sebab hal itu dapat menimbulkan terjadinya ketidakseimbangan antara kemampuan penyediaan kebutuhan manusianya dengan lonjakan pertumbuhan mereka sendiri.³⁹

C. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan ialah kondisi saat seseorang kekurangan atau sama sekali tidak memiliki sesuatu yang terkait pada kualitas kehidupan mereka yang dimiliki orang pada umumnya, yakni makanan pokok, rumah, air

³⁸ Agustina Bidarti, *Teori Kependudukan*, (Bogor: Lidan Bestari, 2020), hal. 17

³⁹ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia...*, hal. 99-100

bersih, serta akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Menurut pendapat lain yang dikemukakan oleh Chambers, kemiskinan merupakan suatu konsep yang saling berkaitan meliputi 5 hal, yakni : kemiskinan itu sendiri, ketidakberdayaan, kerentanan dalam menghadapi situasi darurat, keterisolasian dan ketidak berdayaan.⁴⁰ Badan Pusat Statistik memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi seseorang dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, baik dalam kebutuhan dasar makanan maupun non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran mereka. Oleh karena itu BPS menggunakan konsep *basic needs approach* dan dalam pengukurannya menggunakan garis kemiskinan dimana jumlah pengeluaran perkapita perbulan sebagai patokan.

2. Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut identifikasi yang dilakukan oleh Sharp, penyebab kemiskinan dari segi ekonomi ada 3 sebagai berikut :

- a. Secara makro kemiskinan timbul disebabkan terdapat perbedaan pola kepemilikan sumber daya, dalam artiannya ada sekelompok orang yang menguasai kepemilikan sumber daya sehingga dapat mengakibatkan munculnya kemiskinan itu sendiri.
- b. Penyebab lain munculnya kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan dalam kualitas tiap sumber daya manusianya. Beberapa orang miskin tidak memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian yang mumpuni seperti yang dimiliki oleh para orang kaya.

⁴⁰ Adit Agus Prastyo, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*, (Semarang: UNDIP Press, 2010), hal. 18

- c. Adanya perbedaan dalam akses modal tentu menjadi hambatan bagi seseorang dalam melakukan usaha, sekelompok lain yang mampu memiliki akses modal pasti lebih leluasa apabila hendak berwirausaha tanpa perlu memikirkan kendala keterbatasan modal.⁴¹

Selain itu menurut Todaro tinggi rendahnya tingkat kemiskinan pada suatu negara dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu:

- a. Tingkat pendapatan nasional
- b. Seberapa besar kesenjangan pada distribusi pendapatan.⁴²

3. Macam-Macam Kemiskinan

Pada umumnya kemiskinan dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut, ialah keadaan dimana pendapatan dari seseorang berada kurang dari garis kemiskinan sehingga orang tersebut tidak atau belum dapat mencukupi kebutuhan dasarnya sendiri untuk bisa hidup dan bekerja.
- b. Kemiskinan relatif, kondisi dimana terjadi ketimpangan pendapatan yang disebabkan karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum merata pada masyarakat.
- c. Kemiskinan kultural, yaitu dimana seseorang miskin akibat kepribadiannya sendiri yang kurang berusaha dan cenderung

⁴¹ Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hal.80

⁴² Michael P Todaro dan Stephen Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 66

bermalas-malasan, bahkan ketika ada yang membantu orang tersebut untuk bangkit dan mendapat kehidupan yang lebih baik ia justru tidak mau bekerja keras sebab sifat buruknya yang sudah mendarah daging.

- d. Kemiskinan struktural, ialah kemiskinan yang disebabkan rendahnya akses terhadap sumber daya pada suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan sehingga kemiskinan bertambah subur.⁴³

4. Indikator Kemiskinan

Dalam hal ini dapat digolongkan berdasarkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif:

a. Indikator Kuantitatif Kemiskinan

Mengacu pada indikator objektif yang diterapkan oleh BPS dan *World Bank*, yakni berupa pengeluaran rata-rata oleh keluarga per hari baik konsumsi dan kebutuhan dasar lain yang setara dengan 2100 kalori/orang/hari atau setara dengan pendapatan penduduk sebesar 1,55 dolar AS per hari. Oleh karena itu, seseorang dikatakan miskin jika pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan.

b. Indikator Kualitatif Kemiskinan

Berikut indikator kualitatif kemiskinan menurut Muttaqin⁴⁴:

- 1) Terbatasnya kebutuhan makanan yang layak secara kesehatan
- 2) Terbatasnya kebutuhan perumahan yang layak secara kesehatan

⁴³ Chriswardani Suryawati, "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional", dalam *Jurnal Manajemen Pembangunan dan Kebijakan*, Vol. 8, No. 03, 2005, hal. 122, <https://doi.org/10.33373/jtp.v4i1.2517>

⁴⁴ Istiana Hermawati, *Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan*, (Yogyakarta: B2P3KS Press, 2015), hal. 19

- 3) Terbatasnya kebutuhan sandang/pakaian yang layak
- 4) Terbatasnya akses pendidikan berkualitas
- 5) Terbatasnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas
- 6) Terbatasnya peluang mendapatkan pekerjaan yang layak secara kemanusiaan
- 7) Terbatasnya akses air bersih yang layak bagi kesehatan
- 8) Terbatasnya akses informasi
- 9) Terbatasnya akses transportasi
- 10) Terbatasnya akses sosial
- 11) Terbatasnya kesempatan berusaha dan kepemilikan sumber ekonomi strategis
- 12) Terbatasnya akses pelayanan pemerintahan
- 13) Terbatasnya tingkat partisipasi dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan publik
- 14) Kurangnya rasa aman
- 15) Kurangnya rasa percaya diri
- 16) Terbatasnya kemampuan untuk memanfaatkan waktu luang
- 17) Terbatasnya kemampuan resolusi konflik dan masalah sosial
- 18) Buruknya kualitas lingkungan, baik secara kesehatan maupun secara sosial
- 19) Rendahnya tingkat disiplin masyarakat
- 20) Rendahnya etos kerja
- 21) Kurang suka menabung/ berinvestasi

- 22) Kurang berorientasi ke masa depan
- 23) Sikap *nrimo* dan mudah menyerah pada nasib/ takdir
- 24) Sikap tergantung⁴⁵

5. Kemiskinan Menurut Perspektif Islam

Dalam Islam, kemiskinan didefinisikan melalui pemahaman yang sedikit berbeda dengan definisi secara konvensional. Islam mendefinisikan kemiskinan ke dalam dua golongan yaitu fakir dan miskin. Definisi fakir menurut mazhab Syafii dan Hambali adalah seseorang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali karena ada sebab khusus yang syar'i (uzur syar'i), seperti usia tua, atau sibuk dalam dakwah sehingga tidak sempat untuk mencari nafkah. Di samping itu, pengertian orang miskin menurut mazhab Syafii dan Hambali adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya meskipun ia memiliki pekerjaan dan penghasilan.⁴⁶

Pendapat lain menurut Al Ghazali kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukan merupakan kemiskinan. Al Ghazali membagi kemiskinan menjadi dua bagian yaitu kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan material dan kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan rohani atau spiritual. Pemahaman tersebut juga didukung oleh pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan bukan hanya merupakan kekurangan barang dan jasa, akan tetapi juga

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 19

⁴⁶ Irfan Syauqi Beik dan Dwi Arsyianti Laily, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 72

kurangnya kemiskinan dalam roh. Rehman juga berpendapat bahwa umat Islam dapat meningkatkan kehidupan rohani dengan meningkatkan kehidupan material mereka. Selain itu, Chapra berpendapat bahwa Islam menjadi agama keseimbangan yang telah memberikan penekanan yang sama pada kedua spiritual dan duniawi.⁴⁷

Oleh karena itu, beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan menurut agama Islam adalah sebagai berikut:

- a. Bekerja, berusaha sendiri untuk mengatasi kemiskinan yang menimpa.
- b. Mendapat bantuan keluarga atau kerabat dekat.
- c. Mendapat bantuan tetangga dan masyarakat.
- d. Mendapat bantuan negara.⁴⁸

⁴⁷ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 23

⁴⁸ Ujang Syahrul, *Pengaruh Anggaran Belanja Bidang Kesejahteraan Rakyat Pendayagunaan ZIS dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, (Jakarta: Tesis Tidak Diterbitkan, 2009), hal. 27

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini:

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Ratih Probosiwi (2016)	Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan	Tingkat pengangguran ternyata tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta, hal ini didukung dengan adanya data bahwa tingkat pengangguran terbuka paling tinggi dan tingkat kemiskinan paling rendah. ⁴⁹	Variabel Independen: Pengangguran Metode Penelitian: Kuantitatif	Subjek: Penelitian meliputi Kota Yogyakarta Periode: 2004-2014
2	Yarlina Yacoub (2012)	Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	Tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Data empiris menunjukkan pola hubungan yang tidak selalu searah antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. ⁵⁰	Variabel Independen: Pengangguran Metode Penelitian: Kuantitatif	Subjek: Penelitian meliputi Provinsi Kalimantan Barat Periode: 2005-2010
3	Novri Silastri	Pengaruh Jumlah	Jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh negatif dan	Variabel Independen:	Variabel Independen:

⁴⁹ Ratih Probosiwi, "Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan", dalam *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 15, No. 2, 2016, <https://ejournal.kemsos.go.id>

⁵⁰ Yarlina Yacoub, "Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat", dalam *Jurnal Eksos*, Vol. 8, No. 3, 2012, ISSN 1693 – 9093 <https://jurnal.untan.ac.id>

	(2017)	Penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi	signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Singingi. ⁵¹	Jumlah Penduduk Metode Penelitian: Kuantitatif	PDRB Subjek: Penelitian meliputi Kabupaten Kuantan Singingi Periode: 2003-2013
4	Sayifullah dan Tia Ratu Gandasari (2016)	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten	Secara simultan, IPM dan pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan. Secara parsial, variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan variabel pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. ⁵²	Variabel Independen: Pengangguran Metode Penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: IPM Subjek: Penelitian meliputi Provinsi Banten Periode: 2008-2012
5	Candra Mustika (2011)	Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-	Hasil menunjukkan bahwa variabel PDB dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. ⁵³	Variabel Independen: Jumlah Penduduk Metode Penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: PDB Subjek: Penelitian meliputi negara Indonesia

⁵¹ Novri Silastri, "Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi", dalam *JOM Fekon*, Vol. 4, No. 1, 2017, <https://jom.unri.ac.id>

⁵² Sayifullah dan Tia Ratu Gandasari, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten", dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 6, No. 2, 2016, <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu>

⁵³ Candra Mustika, "Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008", dalam *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol. 1, No. 4, 2011, <https://doi.org/10.22437/paradigma.v0iOktober.57>

		2008			Periode: 1990-2008
6	Durrotul Mahsunah (2013)	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Timur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan. Secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap kemiskinan. ⁵⁴	Variabel Independen: Jumlah Penduduk, Pengangguran Metode Penelitian: Kuantitatif	Subjek: Penelitian meliputi Provinsi Jawa Timur Periode: 2010-2011
7	Mochammad Dwi Ainoer Rizzal, Mohammad Saleh, Aisah Jumiaty (2017)	Determinan Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Periode 2007-2015	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif serta upah dan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. ⁵⁵	Variabel Independen : Pengangguran Metode Penelitian: Kuantitatif	Subjek: Penelitian meliputi Pulau Jawa Periode: 2007-2015
8	I Komang Agus Adi Putra dan Sudarsana Arka (2018)	Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, kemudian kesempatan kerja dan tingkat pendidikan berpengaruh negatif	Variabel Independen: Pengangguran Terbuka Metode Penelitian: Kuantitatif	Subjek: Penelitian meliputi Provinsi Bali Periode: 2011-2016

⁵⁴ Durrotul Mahsunah, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Timur", dalam *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 1, No. 3, 2013, <https://doi.org/10.26740/jupe.v1n3.p%25p>

⁵⁵ Mochammad Dwi Ainoer Rizzal, Mohammad Saleh, dan Aisah Jumiaty, "Determinan Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Periode 2007-2015", dalam *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 5. No. 2, 2017, ISSN: 2355-4665, <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5790>

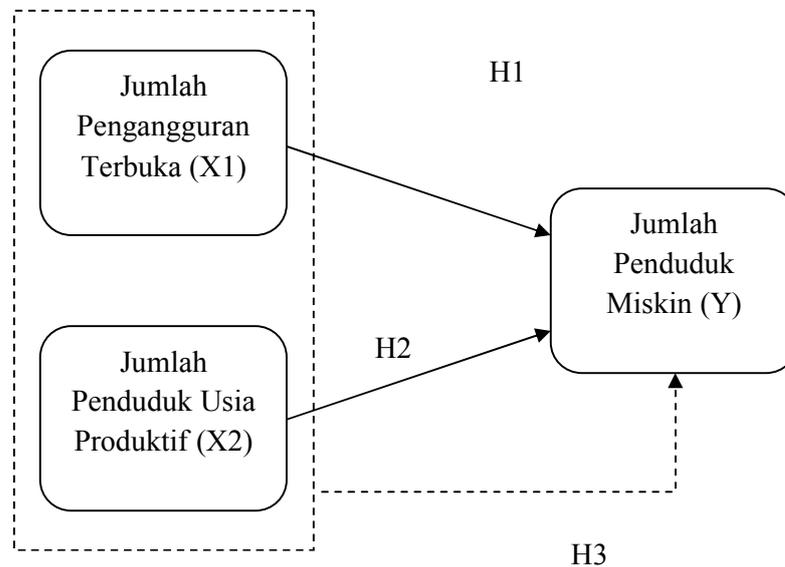
		Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. ⁵⁶		
9	Meti Astuti dan Indri Lestari (2018)	Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Kulonprogo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan Yogyakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi Kulonprogo, Bantul, Gunung Kidul dan variabel pengangguran Kulonprogo, Bantul, Gunung Kidul, Yogyakarta berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi Sleman, Yogyakarta dan variabel pengangguran Sleman berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. ⁵⁷	Variabel Independen: Pengangguran Metode Penelitian: Kuantitatif	Subjek: Penelitian meliputi Kabupaten/Kota Kulonprogo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman dan Yogyakarta Periode: 2013-2016

⁵⁶ I Komang Agus Adi Putra dan Sudarsana Arka, "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali", dalam *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 7, No. 3, 2018, ISSN: 2303-0178, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/37696>

⁵⁷ Meti Astuti dan Indri Lestari, "Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Kulonprogo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan Yogyakarta", dalam *At-Tauzi': Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 18, No. 2, 2018, <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/view/29>

E. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Pola pengaruh dalam kerangka berfikir penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin didasarkan pada teori Murni Asfia⁵⁸, Lincoln Arsyad⁵⁹ dan dikembangkan dari tinjauan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratih Probosiwi⁶⁰, Yarlina Yacoub⁶¹, Sayyifullah dan Tia Ratu Gandasari,⁶² Durrotul Mahsunah⁶³, Mochammad Dwi Ainoer Rizzal, Mohammad Saleh, Aisah Jumiati⁶⁴, I Komang Agus Adi Putra dan

⁵⁸ Murni Asfia, *Ekonomi Makro...*, hal.198

⁵⁹ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar...*, hal. 330

⁶⁰ Ratih Probosiwi, "Pengangguran dan Pengaruhnya...", hal. 89

⁶¹ Yarlina Yacoub, "Pengaruh Tingkat Pengangguran...", hal.

⁶² Sayyifullah dan Tia Ratu Gandasari, "Pengaruh Indeks...", hal. 250

⁶³ Durrotul Mahsunah, "Analisis Pengaruh...", hal.12

⁶⁴ Mochammad Dwi Ainoer Rizzal dkk., "Determinan Jumlah Penduduk...", hal. 168

Sudarsana Arka⁶⁵, serta Meti Astuti dan Indri Lestari⁶⁶. Kemudian jumlah penduduk usia produktif terhadap jumlah penduduk miskin didasarkan pada teori Malthus, Harrod-Domar, Mudrajad Kuncoro⁶⁷ dikembangkan dari tinjauan penelitian terdahulu oleh Novri Silastri⁶⁸, Candra Mustika⁶⁹, dan Durrotul Mahsunah⁷⁰ yang telah dicantumkan sebelumnya. Untuk pengaruh jumlah penduduk usia produktif dan jumlah penduduk usia produktif terhadap jumlah penduduk miskin dikembangkan dari landasan teori yang dipaparkan oleh Mudrajad Kuncoro bahwa jumlah penduduk yang tidak terkendali akan mendongkrak angka kemiskinan, serta apakah kedua variabel tersebut (jumlah pengangguran terbuka dan jumlah penduduk usia produktif) secara simultan memiliki pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

F. Hipotesis Penelitian

- H1 : Ada pengaruh signifikan antara jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung.
- H2 : Ada pengaruh signifikan antara jumlah penduduk usia produktif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung.
- H3 : Ada pengaruh signifikan antara jumlah pengangguran terbuka dan jumlah penduduk usia produktif secara simultan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung.

⁶⁵ I Komang Agus Adi Putra dan Sudarsana Arka, "Analisis Pengaruh Tingkat...", hal. 440

⁶⁶ Meti Astuti dan Indri Lestari, "Analisis Pengaruh Tingkat...", hal. 161

⁶⁷ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia...*, hal. 99-100

⁶⁸ Novri Silastri, "Pengaruh Jumlah Penduduk...", hal.114

⁶⁹ Candra Mustika, "Pengaruh PDB dan...", hal.22

⁷⁰ Durrotul Mahsunah, "Analisis Pengaruh...", hal.12